Analisis Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa (Tahun 2011-2016)

JURNAL PENELITIAN

Oleh :

Nama : Aditya Iswanto

Nomor Mahasiswa : 14313054

Jurusan : Ilmu Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

2

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

Analisis Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa (Tahun 2011-2016)

Nama	: Aditya Iswanto
Nomor Mahasiswa	: 14313054
Jurusan	: Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Indah Susantun, Dra.,M.Si

Analisis Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan Penduduk Miskin Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa (Tahun 2011-2016)

Aditya Iswanto

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
adityaiswanto@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, pengeluaran pemerintah dan penduduk miskin terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa tahun 2011-2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif . Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan cakupan wilayah 6 provinsi di pulau jawa pada periode 2011-2016. Penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Y) sebagai variabel dependent, sedangkan inflasi (X1), Penduduk Miskin (X2) , Pengeluaran Pemerintah (X3) dan Produk Domestik Regional Bruto (X4) sebagai variabel independen. Metode penelitian yang digunakan *random effect methode*. Hasil penelitian menunjukkan jumlah penduduk miskin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan , Inflasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatn serta produk domestik regional bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara bersama-sama inflasi , Produk domestik regional bruto , penduduk miskin dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Kata Kunci : *Indeks Gini, Inflasi, Penduduk Miskin, Pengeluaran pemerintah , Produk Domestik Regional Bruto*

Analysis Of Inflation, Gross Regional Domestic Product, Goverment Expenditure, and Poor Population to Distribution Of Income Inequality In Java Island (Year 2011-2016)

Aditya Iswanto

Economics Department, Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia
adityaiswanto@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of inflation, gross Regional domestic product, government expenditure and total poor population to distribution of income inequality in Java at years 2011-2016. This research uses a quantitative approach. The data used in this research is secondary data obtained from the website of the Central Bureau of statistics (BPS) and the Directorate General of Financial Equalization (DJPK) with a coverage area of 6 provinces in Java island in the period of 2011-2016. This research uses 4 variables, those variables are distribution of income inequality (Y) as the dependent variable, while inflation (X1), poor population (X2), government expenditure (X3) and gross Regional domestic product (X4) as independent variables. The method of this research used random effect method. The results revealed poor population does not have significant impact to distribution of income inequality; inflation and Government expenditure has a positive and significant impact to distribution of income inequality. Gross regional domestic product has a negative and significant impact to distribution of income inequality. Collectively, the inflation, gross regional domestic product, poor population and Government expenditure have significant impact to distribution of imcome inequality.

Keyword : *Gini Ratio, Inflation, Poor Population, Goverment Expenditure, and Gross Domestic Regional Product*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan . Proses pembangunan ekonomi mempunyai tujuan yaitu peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan pokok ; peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2006). Disamping itu , pembangunan ekonomi juga memliki banyak masalah dan kendala dalam pengimplementasiannya yaitu lebih memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi atau pemerataan distribusi pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan suatu permasalahan yang dialami negara sedang berkembang dimana di daerah tertentu pertumbuhan ekonominya tinggi dan cepat sedangkan di daerah lain justru berbanding terbalik dimana pertumbuhan ekonominya menurun atau melambat. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan sumber daya yang dimiliki. Investor lebih memillih daerah perkotaan yang memiliki fasilitas yang memadai seperti sarana-prasarana perhubungan , jaringan listrik, tenaga terampil dll. Selain itu adanya ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan dari pembagian pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang belum merata (Kuncoro, 2006).

Beberapa ekonom berpendapat bahwa kebijakan untuk memprioriatskan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sudah tidak bisa menjadi solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara sedang berkembang (Arsyad, 2010). Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan mengindikasikan bahwa negara tersebut belum berhasil dalam proses pembangunannya. Apabila perekonomian di negara tersebut berjalan dengan baik maka tingginya laju pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh selutuh pelaku ekonomi yang terlibat didalamnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang dengan disertai perbaikan sistem kelembagaan seperti ekonomi, sosial, budaya dan hukum (Arsyad, 2010) . Tetapi peningkatan pendapatan secara terus menerus dalam jangka panjang tidaklah cukup untuk menunjukkan bahwa pembanguan ekonomi dinegara tersebut berjalan dengan baik . Perlu adanya perbaikan struktur sosial, kelembagaan dan perilaku masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan (Todaro, 2006) .

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan dan perkembangan suatu kegiatan ekonomi dalam perekonomian suatu negara yang dapat menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masayarakat terus bertambah.Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu Tanah dan kekayaan alam lainnya ; Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja ; Barang-barang modal dan tingkat teknologi ; serta Sistem sosial dan sikap masyarakat (Sukirno, 2010) .

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pencapaian nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut . PDRB dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh pembangunan yang telah berhasil menyejahterakan masayarakatnya. Berikut tabel PDRB pulau-pulau di Indonesia

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Pulau-Pulau di Indonesia

Pulau	Produk Domestik Regional Bruto (milliar rupuah)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sumatra	1631727	1725536	1810953	1894170	1961071	2045251
Jawa	**4182446**	**4448833**	**4716410**	**4979136**	**5251291**	**5544826**
Bali & Nusa tenggara	213705	222155	235375	249269	275307	291516
Kalimantan	687807	727155	755866	781344	792047	807964
Sulawesi	386696	421671	454095	485290	525030	563977
Maluku & Papua	184534	190434	205123	214428	228046	245035
Indonesia	7287635	7727083	8156498	8564867	8982511	9433034

Sumber : BPS 2016 , diolah

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto dari 2011-2016 berada pada jalur yang postif tetapi besaran PDRB antar pulau belum merata. Pulau jawa sebagai pulau yang merupakan basis dari pusat pemerintahan dan perekonomian menunjukkan nilai PDRB paling besar di Indonesia . Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa selalu meningkat disetiap tahunnya . Pulau Jawa menyumbang sebesar 58.78 % dari PDB Nasional pada tahun 2016 . Besarnya presentase sumbangan tersebut masih banyak menimbulkan pemasalahan ekonomi yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dapat menggunakan indeks gini.

Tabel 1. 2 Indeks Gini Pulau-Pulau Di Indonesia

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
Pulau Sumatra	0.34	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.3467
Pulau Jawa	**0.38**	**0.4**	**0.39**	**0.41**	**0.4**	**0.4**	**0.3967**
Bali & Nusa Tenggara	0.36	0.37	0.38	0.4	0.37	0.37	0.375
Kalimantan	0.34	0.36	0.37	0.36	0.32	0.33	0.3467
Sulawesi	0.39	0.4	0.4	0.41	0.38	0.38	0.3933
Maluku & Papua	0.36	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.37

Sumber : BPS 2016 , diolah

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata indeks gini Pulau Jawa dari 2011-2016 paling besar sebesar 0.3967 dibanding pulau lain di Indonesia. Tingginya rata-rata indeks gini selama 6 tahun terakhir tidak sesuai dengan tingginya Produk Domestik Regional Bruto di pulau tersebut di indonesia. Hal ini membuktikan bahwa di pulau jawa ditemukan permasalahan terkait tentang tingginya ketimpangan distribusi pendapatan dengan tingginya Produk Domestik Bruto Regional.

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu dari Dhyatmika & Atmanti, (2013) melakukan penelitian Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran . Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif terhadap tingkat ketimpangan pembangunan, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan, dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan.

Penelitian terdahulu dari Nangarumba, (2015) melakukan penelitian yang berjudul Analisi Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PDRB dari Sektor Pertanian, PDRB Sektor Jasa, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan juga Kredit Investasi berhubungan negatif dengan ketimpangan distribusi Pendapatan sedangkan PDRB sektor industri merupakan satu-satunya variabel yang berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sunanda (2017) menjelaskan bahwa metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan Fixed Effect Model. Hasil penelitiannya PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sedangkan variabel jumlah penduduk dan IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan uji F , PDRB , jumlah penduduk dan IPM secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sultan & Sodik (2010) menjelaskan bahwa analisis ini menggunakan indeks kesenjangan entropy theil dan analisis linier berganda. Hasil penelitianya adalah penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah. Pertumbuhan ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah.

Penelitian terdahulu dari Lestari, (2016) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di jawa timur tahun 2008-2012. Hasil analisisnya yang telah diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk secara sendiri-sendiri berpengaruh positif dan signifikant terhadap ketimpangan pendapatan di kabupaten/kota provinsi jawa timur . sedangkan inflasi justru berpengaruh negatif dan signifikant terhadap ketimpangan pendapatan kabupaten/kota provinsi jawa timur

Penelitian terdahulu dari Danawati dkk (2016) Penelitian ini yang berjudul Pengaruh Pengeluaran pemerintah Dan Investasi terhadap kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpngan pendapatan kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi signifikan terhadap kesempatan kerja .Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pengeluaran pemerintah , kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pengeluaran pemerintah dan investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan melalui kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonmi .

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarlan (2015) menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode eksplanatoris dengan data time series dan cross section dan mengaplikasian model persamaan simultan dengan menggunakan teknik regresi two stage least square (2SLS). Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan signifikan secara statistik. Pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap ketimpangan pendapatan. Tetapi kemiskinan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh pada kemiskinan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2018) menjelaskan bahwa PDRB Perkapita hasilnya positif dan signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan pengeluaran pemerintah hasilnya negatif dan signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Namun untuk penduduk miskin hasilnya tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.

Landasan Teori

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah dari nilai tambah yang diperoleh dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada pada suatu daerah oleh seluruh unit usaha .Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku merupakan gambaran atas nilai tambah barang dan jasa dengan perhitungannya menggunakan faktor harga periode sekarang atau saat ini sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan gambaran atas nilai tambah barang dan jasa dengan perhitungannya menggunakan faktor harga acuan sebagai tahun dasar(BI, 2018). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku mempunyai fungsi untuk mengetahui sebaran struktur ekonomi suatu wilayah pada suatu daerah sedangkan Produk Domestik Regional Bruto harga konstan mempunyai fungsi untuk mengetahui keunggulan dan kemampuan sumber daya suatu daerah dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil pada suatu daerah dan PDRB ini tidak terpengaruh pleh harga periode saat ini. (BI, 2018).

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan

sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (BI, 2018). Terdapat dua penyebab yang dapat meyebabkan terjadinya inflasi yaitu demand pull inflation dan cost push inflation (Sukirno, 2006).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian , yaitu teori makro dan teori mikro (Mangkoesoebroto, 1993). Teori Makro terdiri dari model pembangunan tentang perkembangan pengeluran pemerintah, Hukum Wagner, Teori Peacok dan Wiseman .

Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2018). Ukuran kemiskinan yang umum digunakan adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad, 2010) .

Ketimpangan distribusi Pendapatan

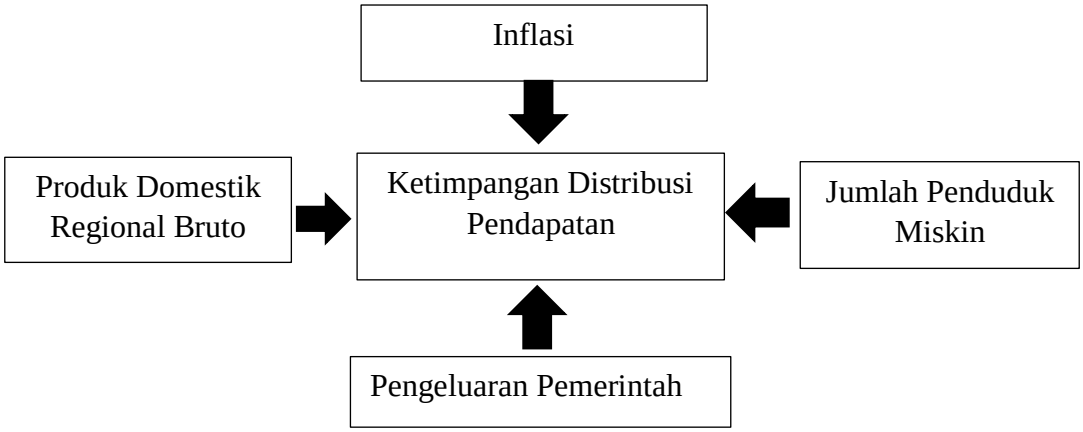
Ketimpangan pendapatan regional merupakan ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat pada suatu daerah dengan daerah lain. Ketidakmerataan tersebut disebabkan adanya perbedaan faktor yang terdapat dalam daerah tersebut. Faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya , fasilitas yang dimiliki , infrastruktur , keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya (Kuncoro, 2004).

Kurva Lorenz

Kurva lorenz menjelaskan bahwa ada hubungan antara presentase penduduk dengan presentase pendapatan yang mereka peroleh atau terima . Contoh pendapatan yang diterima selama 1 tahun , semakin jauh kurva lorenz dari garis diaogonal maka semkin tinggi tingkat ketimpangan atau ketidakmerataan suatu daerah yang diperlihatkan dari gambar tersebut . Sebagai contoh , suatu keadaan jika pendapatan diterima oleh satu orang sajaa maka kurva tersebut akan menunjukka bahwa ada semakin melengkung kurva lorenz yang mengakibatkan semakin berhimpitnya dengan sumbu vertikal bagian kanan dan sumbu horisontal bagian bawah.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian telaah penelitian sebelumnya dan kajian teori maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Hubungan Antar Variabel

Hubungan Inflasi dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan (BPS, 2018) . Inflasi secara keseluruhan menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penrunan . Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan jumlah barang yang dibeli akan menurun . Masyarakat yang pendapatannya kecil dan paling besar terkena dampak inflasi ini sehingga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan mereka. Akibatnya dapat memperlebar ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat

Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan

Tingginya PDRB mencerminkan keberhasilan suatu wilayah atau daerah dalam mengoptimalkan akan sumber daya yang dimiliki dan tersedia sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut . Namun di beberapa negara sedang berkembang selalu mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam mencapai sebuah pembangunan ekonomi. Namun kebujakan tersebut justru dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan pada waktu tertentu kemudian mengalami penurunan pada suatu tingkat tertentu (Arsyad, 2010). Ini sesuai dengan Simon Kuznet (1955) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai , distribusi pendapatan akan makin tidak merata namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan makin merata (Kuncoro, 2006).

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berhubungan negatif dengan ketimpangan distribusi pendapatan . Pengaruh negatif pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan juga sesuai dengan pendapat Todaro, (2006) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat , pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik yaitu secara langsung berupa belanja pegawai, belanja barang

dan jasa dan belanja modal dan secara tidak langsung melalui belanja subsidi (subsidi pendidikan) , belanja hibah , belanja bantuan sosial (subsidi kesehatan) , belanja bantuan keuangan kepada prov/kab/kota dan pemdes dan belanja tidak terduga. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik akan secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah yang berbeda pada setiap daerah akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah yang kemudian akan mempengaruhi pendapatan masyarakat .

Hubungan Jumlah Penduduk Miskin dengan Ketimpangan Distribusi Pendaptan

Jumlah penduduk miskin sangat berhubungan erat dengan situasi ketimpangan distribusi pendapatan. Penduduk miskin sangat memiliki keterbatasan dalam menjangkau fasilitas yang telah diberikan kepada masyarakat umumnya. Rendahnya pendidikan yang diterima oleh penduduk miskin menyebabkan kualitas sumber daya manusia menjadi rendah . Rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan produktivitasnya menjadi rendah sehingga mereka kesulitas dalam mencari pekerjaan yang tetap atau pekerjaan di sektor formal. Dengan sulitnya kondisi ini , mereka kemudian mencari pekerjaan di sektor informal tetapi mereka terkendala dengan minimnya modal dan keterbatasan pengetahuannya. Dengan situasi ini mereka hanya bisa mendapatkan penghasilan yang rendah sehingga semakin memperbanyak jumlah penduduk miskin. Hal ini semakin memperlebar kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin dengan penduduk kaya . Ketika penduduk miskin semakin bertambah , semakin tinggi pula tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah .

Hipotesis Penelitian

H_1 : Inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan disribusi pendapatan di pulau jawa.

H_2 : Penduduk Miskin berpengaruh positif terhadap ketimpangan disribusi pendapatan di pulau jawa.

H_3 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap ketimpangan disribusi pendapatan di pulau jawa.

H_4 : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan disribusi pendapatan di pulau jawa.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data yang diambil dengan metode data panel yang diperoleh dari data BPS (Badan Pusat Statistik) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).. Dalam penelitian ini diperoleh data-data inflasi , Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran Pemerintah dan penduduk miskin . Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan alat software e-views 8. Data panel merupakan penggabungan antara data time series dan data cross section. Model persamaan dapat ditulis sebagai berikut;

$Y=\beta o+\beta 1X1+\beta 2\log X2+\beta 3\log X3+\beta 4\log X4+e$

Dimana:

Y = Indeks Gini

X1 = Inflasi

X2 = Produk Domestik Regional Bruto

X3 = Jumlah Penduduk Miskin

X4 = Pengeluaran Pemerintah

Data panel dianalisis dengan menggunakan tiga model yaitu Common Effect, Fixxed Effect, dan Random Effect. Dari ketiga model tersebut, maka dapat dilakukan pengujian pertama untuk memilih model yang layak digunakan antara model Common Effect dengan Fixxed Effect dengan menggunakan uji Chow. Jika hasil uji chow ini signifikan (F-statistik > F-hitung atau P-value < α 0.05) maka model Fixxed effect yang digunakan dan dilanjutkan ke model Random Effect, dan jika hasilnya tidak signifikan (F-statistik < F-hitung atau P-value > α 0.05) maka model yang layak digunakan yaitu Common Effect dan tidak perlu dilanjutkan ke model Random Effect.

Pengujian selanjutnya yaitu menguji antara model Fixxed Effect dengan Random Effect dengan menggunakan uji Hausman untuk memilih model yang layak digunakan dalam estimasi akhir. Jika hasil uji Hausman signifikan (chi-sq statistik > chi-sq tabel atau P-value < α 0.05) maka model yang layak digunakan yaitu Fixxed Effect, dan jika hasil uji hausman tidak signifikan (chi-sq statistik < chi-sq tabel atau P-value > α 0.05) maka model yang layak digunakan yaitu Random Effect.

Selain menggunakan tiga model analisis diatas, peneliti juga melakukan pengujian statistik diantaranya yaitu Koefisien Determinasi (R2), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F-statistik), dan pengujian koefisien regresi secara individul (Uji t-statistik). Atas dasar beberapa uji yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan uji chow dan uji hausman, maka model Random Effect merupakan model yang layak digunakan untuk estimasi akhir yaitu Random Effect Models.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.589.868	(5,26)	0.0498
Cross-section Chi-square	14.549.951	5	0.0125

Sumber : data diolah dengan eviews 9

Uji chow test berfungsi untuk menentukan model mana yang cocok digunakan antara estimasi Common Effect Model atau Fixed Effect Model dengan uji hipotesis sebagai berikut :

a. Ho : memilih model estimasi Common Effect
b. H1 : memilih model estimasi Fixed Effect

Uji F-statistik ini akan dianalisis dengan melihat nilai probabilitas F-statistik. Apabila probabilitas F-statistik tidak signifikan atau α > 10% maka model yang tepat untuk dipilih adalah estimasi Common Effect Model . Sebaliknya , jika nilai probabilitas F-Statistik signifikan atau α < 10% , maka model yang diplih adalah model estimasi Fixed Effect.

Dari hasil uji pengujian chow test diperoleh hasil nilai distribusi chi-square adalah sebesar 14.549951 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0125 < α = 10% , artinya menolak Ho dan memilih H_1. Hal tersebut menunjukkan bahwa model estimasi yang dipilih adalah model Fixed Effect.

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.885.501	4	0.5772

Sumber : data diolah dengan eviews 9

Uji ini berfungsi untuk menentukan model mana yang cocok digunakan antara estimasi Fixed Effect Model atau Random Effect Model dengan uji hipotesis sebagai berikut :

a. Ho : memilih model estimasi Random Effect
b. H1 : memilih model estimasi Fixed Effect

Uji hausman akan dianalisis dengan melihat nilai probabilitas Chi square Statistic. Apabila probabilitas Chi Square Statistic atau α > 10% , maka model yang dipilih adalah model estimasi Random Effect . Sebaliknya , jika nilai probabilitas Chi Square Statistic signifikan atau α < 10% , maka model yang tepat untuk dipilih adalah estimasi Fixed Effect Model.

Dari hasil uji Hausman diperoleh hasil nilai chi-square adalah sebesar 2.885501 dengan nilai probabilitas sebesar 0.5772 > α = 10% , artinya menerima Ho dan menolak H1. Hal tersebut menunjukkan bahwa model estimasi yang tepat untuk dipilih adalah menggunakan Random Effect Model .

Tabel 3. Hasil Regresi Random Effect Models

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.411285	0.103556	3.971.632	0.0004
INF?	0.001093	0.001169	0.934438	0.3573
PM?	-0.000923	0.001455	-0.634306	0.5305
LOG(PDRB?)	-0.031678	0.009708	-3.262.908	0.0027
LOG(PP?)	0.025315	0.009876	2.563.160	0.0154
Random Effects (Cross)				
_Banten--C	-0.007712			
_Jabar--C	0.011076			
_Jakarta--C	0.002839			
_Jateng--C	-0.010974			
_Jatim--C	1.65E-05			
_Yogya--C	0.004754			
R-squared	0.306567			

F-statistic	3.426.273
Prob(F-statistic)	0.019741

Sumber : data diolah dengan eviews 9

Dari hasil akhir regresi model Random Effect (Tabel 3) diperoleh nilai R_2 sebesar 0.306567 artinya bahwa variabel dependen Indeks Gini dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu inflasi ,jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah, dan PDRB sebesar 30.66 % dan sisanya sebesar 69.34% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

Dari hasil akhir regresi Random Effect (Tabel 3) menunjukkan nilai sebesar 4.034184 dengan probabilitas sebesar 0.019741 < α = 10% . Artinya bahwa variabel independen yaitu Inflasi (X1), Jumlah Penduduk Miskin (X2) , Pengeluaran Pemerintah (X3), dan PDRB (X4) secara bersama-sama signifikant mempengaruhi variabel dependen yaitu keimpangan distribusi pendapatan (IG)

Dari hasil regresi Random Effect (Tabel 3) dengan taraf signifikansi 10% (α = 10%), bahwa inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3573 > α=10% dan t-hitung sebesar 0.934438. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.

Dari hasil regresi Random Effect (Tabel 3) dengan taraf signifikansi 10% (α = 10%), variabel Jumlah Penduduk Miskin (PM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5305 > α =10% dan t-hitung sebesar -0.634306. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.

Dari hasil regresi Random Effect (Tabel 3) dengan taraf signifikansi 10% (α = 10%), variabel pengeluaran pemerintah (PP) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0154 < α =10% dan t-hitung sebesar 2.563160 . Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.

Dari hasil regresi Random Effect (Tabel 3) dengan taraf signifikansi 10% (α = 10%), variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0027 < α = 10% dan t-hitung sebesar -3.262908. Secara statistik menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.

Interpretasi Hasil dan Analisis

Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil estimasi Random Effect (Tabel 3) inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,3573 > α = 10%.. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini karena inflasi bersifat fluktuatif dan pada bulan Februari 2015 setiap provinsi mengalami deflasi. Hal tersebut terjadi karena turunnya harga pada 3 komoditas , seperti pada bulan Februari 2015 PT.PLN melakukan penurunan tarif listrik sebagai mekanisme penyesuain (tarif adjustment)

untuk 12 golongan pelanggan termasuk pelanggan rumah tangga dengan daya 1300 VA, 2200 VA, 3500VA s.d 5500 VA dan 6600VA keatas ; Penurunan tarif batas atas dan tarif batas bawah pengguna jasa angkutan udara kelas ekonomi jadwal dalam negeri sebesar 5% keputusan tersebut tertuang dalam PERMENHUB No. PM 14 tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri dan berlaku selama 30 hari sejak permenhub 14 dikeluarkan pada 28 Januari 2016 lalu ; Komoditi bensin jenis pertamax, pertamax plus dan pertalite mengalami penurunan harga per tanggal 5 Februari 2015. Pertamax – dari harga Rp 8450 menjadi Rp 8250/ltr. Pertamax Plus – dari harga Rp 9350 menjadi Rp 9150/ltr. Pertalite- dari harga Rp 7800 menjadi Rp 7600/ltr.

Pada tahun 2013 dan 2014 mengalami inflasi yang signifikan dimana penyebab utamanya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan premium menjadi Rp 6500/liter dan solar Rp 5500/liter. BBM memberi andil atas inflasi sebesar 1.17%. Kenaikan harga BBM juga membuat harga beberapa komoditas lainnya merangkak naik seperti tarif angkutan dalam kota memberikan andil inflasi 1.75% .

Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil estimasi Random Effect (Tabel 3) penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.5305 > (α =10%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. . Kesimpulan ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Tolak ukur kemiskinan tidak hanya diukur dari jumlah penduduk miskin. Badan Pusat Statistik menggunakan tiga indikator kemiskinan yaitu Head Count Index , Poverty Gap Index dan , Proverty Security Index (BPS, 2018). Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Sudarlan, (2015) yang menjelaskan bahwa kemiskinan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel kemiskinan yang terdiri dari Head Count Index, Poverty gap Index dan Proverty Security Index. Penelitian dari (Wicaksono, 2018) juga menjelaskan bahwa penduduk miskin tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di sulawesi selatan tahun 2011-2015.

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil estimasi Random Effect (Tabel 4.3) pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dilihat dari koefisien pengeluaran pemerintah sebesar 0.037334 , artinya bahwa apabila pengeluaran pemerintah naik 1% maka ketimpangan distribusi pendapatan naik sebesar 0.037334 % . Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa pengeluaran pmerintah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Danawati dkk (2016) dan Wahyuni dkk (2014) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan dengan ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi bali .Dalam penelitian

ini menunjukkan bahwa besaran pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan . Hasil ini bisa disebabkan karena kebijakan pengeluaran pemerintah yang dilakukan pemerintah belum optimal dalam pengalokasiannya untuk menangani masalah ketimpangan pendapatan . Meskipun besaran pengeluaran pemerintah setiap provinsi setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi peningkatan tersebut belum bisa dialokasikan secara merata ke seluruh masyarakat sehingga masyarakat belum bisa merasakan secara langsung dampak dari peningkatan pengeluaran pemerintah .

Analisis Pengaruh PDRB terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari hasil estimasi Random Effect (Tabel 4.3) PDRB (Produk Domestik Bruto) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Dilihat dari koefisien PDRB (Produk Domestik Bruto) sebesar 0.036967, artinya bahwa apabila PDRB naik 1% maka ketimpangan distribusi pendapatan turun sebesar 0.036967 % . Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Nangarumba, 2015) yang menunjukkan bahwa PDRB sektor pertanian dan PDRB sektor jasa berpengaruh negatif dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia . Penelitian ini juga sesuai dengan (Sultan & Sodik, 2010) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah . Penelitian ini sesuai dengan (Sunanda, 2017) yang menujukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi bengkulu .

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

1. Ketimpangan distribusi pendapatan yang tertinggi di pulau jawa adalah Jawa Barat dan yang terendah adalah Jawa tengah .
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada provinsi di pulau jawa. Hal ini berati inflasi suatu daerah tidak mempengaruhi tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.
3. Hasil peneliatan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa. Hal ini berati jumlah penduduk miskin di pulau jawa tidak mempengaruhi tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.
4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada provinsi di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah justru malah semakin besar pula ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa . Hal ini disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah di setiap provinsi belum bisa merata dalam pengalokasian dalam kegiatan produktif sehingga masyarakat belum bisa merasakan secara penuh dari manfaat kebijakan pengeluaran pemerintah yang sudah di lakukan dan struktur ekonomi di setiap provinsi berbeda sehingga kebijakan pengeluaran pemerintah ini belum bisa menurunkan tingkat ketimpangan distibusi pendapatan.

5. Hasil penelitian menemukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada provinsi di pulau jawa. Hal ini berati kenaikan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah maka dapat menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.
6. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Inflasi , Jumlah Penduduk Miskin , Pengeluaran Pemerintah , dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama-sama signifikant mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan .

Implikasi :

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu :

1. Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu , pemerintah harus lebih serius dan hati-hati dalam penetapan strategi pengalokasian dan pendistribusian pengeluaran pemerintah secara merata sehingga dengan penerapan kebijakan pengalokasian pengeluaran pemerintah yang tepat bisa menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa .
2. Penelitian ini menjelasakan bahwa PDRB berpengaruh negatif dengan ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa . Jadi , pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PDRB tanpa harus memperbesar ketimpangan distribusi pendapatan yang akan timbul pada tiap provinsi dengan cara , pemerintah daerah harus berperan aktif untuk memberikan fasilitas usaha padat karya sehingga akan menimbulkan pengembangan ekonomi yang berorientasi pada terciptanya perluasan lapangan pekerjaan, Dalam menunjang usaha padat karya tersebut , pemerintah dapat memberikan KUR supaya modal untuk membangun suatu usaha tidak terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

BI. (2018). Produk Domestik Regional Bruto. Retrieved March 1, 2018, from http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/8_PDRB_SEKDA_v2.pdf

BPS. (2018a). Inflasi. Retrieved March 23, 2018, from https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html#subjekViewTab1

BPS. (2018b). Kemiskinan dan Ketimpangan. Retrieved February 28, 2018, from https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1

Danawati, S., Bendesa, I. K., & Suyana Utama, M. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Bisnis Universitas Udayana*, *57*, 2123–2160.

Dhyatmika, K. W., & Atmanti, H. D. (2013). Analisis ketimpangan pembangunan provinsi banten pasca pemekaran. *Diponegoro Journal of Economics*, *2*(2), 1–8.

Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.

Hakim, A. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia.

Jhingan, M. . (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan daerah*. Jakarta: Erlangga.

Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Lestari, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempenagruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012*. Retrieved from http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73804/SUSI LESTARI.pdf?sequence=1

Mangkoesoebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.

Muhaimin, I. F. (2014). *Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2007-2011*. Universitas Islam Indonesia.

Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi , Upah Minimum

Provinsi , Belanja Modal , dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jesp*, *7*(2), 9–26.

Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sukirno, S. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sukirno, S. (2010). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Jakarta: Erlangga.

Wahyuni, I. G. A. P., Sukarsa, M., & Yuliarmi, N. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pmerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *3*(8), 791–805.

Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews* (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.